

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN ANGGARAN 2019**

KOTA : Banjarbaru
 NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
 URUSAN PEMERINTAHAN DILAKSANAKAN : (per urusan masing-masing yang dilaksanakan)

NO	IKK		DOKUMEN PENDUKUNG YANG HARUS DILAMPIRKAN		KETERANGAN
1	ASPEK KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA				
	A	Sebutkan jumlah program nasional urusan yang dilaksanakan oleh SKPD Saudara tahun 2019	Prog. 0	FotoCopy halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukkan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	
		Sebutkan jumlah program nasional (RKP) yang harus ada di kab/kota untuk urusan di tahun 2019	9 (Sembilan) Prog.		
	B	Ada/Tidak nya keberadaan Standard Operating Procedure (SOP), jika ada sebutkan keseluruhan SOP yang dilaksanakan di SKPD.	14 Buah	FotoCopy : 1. Halaman Muka (Cover) 2. Halaman yang menunjukkan tahapan-tahapan Prosedur, dan 3. Halaman yang menunjukkan ditandatanganinya SOP tsb	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis
2.	KETAATAN TERHADAP PERATURAN / UU				
	A	Sebutkan Jumlah PERDA / PERKADA yang berkaitan dengan pelaksanaan Urusan Pemerintahan	1 Perda	Fotocopy halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda pelaksanaan urusan Pemerintahan Tersebut	
3.	PENATAAN KELEMBAGAAN				
	A	Sebutkan Jumlah Jabatan yang di isi dalam SKPD	3 Orang	Daftar rincian Pejabat Definitif pada SKPD	
		Sebutkan Jumlah seluruh Jabatan ada dalam SKPD	14 orang	Foto Copy Daftar susunan Struktur organisasi dari SKPD	Struktur organisasi dari SKPD khususnya bidang yang menangani urusan terkait
	B	Sebutkan Jumlah Jabatan Fungsional Teknis (JFT) dalam SKPD Saudara, Jika terdapat JFT dalam struktur organisasi SKPD.	4 Orang	Daftar rincian jabatan fungsional Teknis yang ada di SKPD pada bidang yang menangani urusan terkait	Yang dihitung adalah Jabatan fungsional teknis sesuai urusan terkait
NO	IKK		DOKUMEN PENDUKUNG YANG HARUS DILAMPIRKAN		KETERANGAN
4.	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN				
	A	Sebutkan Jumlah PNS yang terdapat dalam SKPD	41 orang	Daftar rincian yang menunjukan jumlah PNS SKPD pada urusan terkait	

	B	Sebutkan Jumlah Pejabat yang sudah mengikuti DIKLATPIM	11 orang	Daftar rincian jumlah pejabat yang sudah ikut diklatpim pada urusan terkait	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan adalah pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM
		Sebutkan Jumlah Pejabat yang ada dalam SKPD Saudara	14 orang	Daftar jumlah pejabat SKPD pada urusan terkait	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait
	C	Sebutkan Jumlah Pejabat yang Memenuhi pesyaratan KEPANGKATAN	14 orang	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim pada urusan terkait	
		Sebutkan Jumlah Pejabat yang ada dalam SKPD Saudara	14 orang	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait	
5.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
	A	Jumlah dokumen perencanaan yang ada :			
		RENSTRA SKPD	ADA TIDAK	Foto Copy RENSTRA tsb	
		RENJA SKPD	ADA TIDAK	Foto Copy RENJA tsb	
		RKA SKPD	ADA TIDAK	Foto Copy RKA tsb	
	B	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	9 (Sembilan) Prog.	Foto Copy halaman halaman yang menunjukkan prog. dari SKPD pada urusan terkait	
		Jumlah program RENJA SKPD	9 (Sembilan) Prog.	Foto Copy halaman yang menunjukkan prog. dari SKPD pada urusan terkait	
	C	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	9 (Sembilan) Prog.	Foto Copy halaman yang menunjukkan program pada urusan terkait yang tercantum dalam Renja	
		Jumlah Program dalam RKA SKPD	9 (Sembilan) Prog.	Foto Copy halaman yang menunjukkan program urusan terkait yang tercantum dalam RKA	
	D	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	9 (Sembilan) Prog.	Foto Copy halaman yang menunjukkan program pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir dalam DPA	
		Jumlah program dalam DPA SKPD	9 (Sembilan) Prog.	Foto Copy halaman yang menunjukkan program pada urusan terkait yang tercantum dalam DPA	
6.	LAPORAN KEUANGAN SKPD				
	A	Sebutkan Jumlah Total Anggaran SKPD	Rp. 17.612.480.990	Foto Copy Laporan Keuangan SKPD	
	B	Sebutkan Jumlah Realisasi Belanja Modal SKPD SKPD	Rp. 4.278.123.170	Foto Copy Laporan Keuangan SKPD	
		Sebutkan Jumlah Realisasi Belanja SKPD	Rp. 15.157.202.662	Foto Copy Laporan Keuangan SKPD	
		Sebutkan Jumlah Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp. 194.652.500	Foto Copy Laporan Keuangan SKPD	Sesuai rekening belanja pemeliharaan
		Sebutkan Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp. 6.842.667.363	Foto Copy Laporan Keuangan SKPD	
	C	Komponen laporan keuangan	<i>coret salah satu</i>		
		NERACA	ADA TIDAK	Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan neraca tsb	
		LRA	ADA TIDAK	Foto Copy halaman muka dan halaman yang menunjukkan LRA	
		CALK	ADA TIDAK	Foto Copy halaman muka dan satu atau dua halaman yang menunjukkan CALK	
NO	IKK		DOKUMEN PENDUKUNG YANG HARUS DILAMPIRKAN		KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK				
	A	Keberadaan LAPORAN INVENTARISASI barang/aset SKPD 5 tahun terakhir	ADA TIDAK	Foto Copy berita acara pelaksanaan inventarisasi	adanya inventarisasi barang/aset SKPD, dalam hal ini aset yang

					dimaksud adalah jumlah aset tetap berdasarkan berita acara pemeriksaan minimal 5 tahun (sensus barang)
	B	Sebutkan dalam Nominal angka (rupiah) aset yang tidak digunakan jika terdapat aset yang tidak digunakan dalam SKPD Saudara	Rp. -	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah aset yang tidak digunakan	
		Sebutkan dalam Nominal angka (rupiah) jumlah total aset yang dikuasai oleh SKPD saudara	Rp. 15.988.930.653	Daftar rincian yang menunjukkan total aset yang dikuasai SKPD	
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT				
	A	Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi	(*coret salah satu)		
		PAPAN PENGUMUMAN	ADA TIDAK	Foto	
		POS PENGADUAN	ADA TIDAK	Foto	
		LEAFLET	ADA TIDAK	FC Leaflet	
		MOBIL KELILING	ADA TIDAK	Foto	
		PENGUMUMAN DI MEDIA MASSA	ADA TIDAK	Foto / Fotocopy Pengumuman	
	B	Keberadaan surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ADA TIDAK	FC cover laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait	

Catatan Penting :

Setiap Elemen Data harus disertai dengan data pendukung berupa dokumen pendukung/kertas kerja yang divalidasi dan ditandatangani oleh pejabat berwenang.

Banjarbaru, Februari 2020
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banjarbaru,



AHMAD YANI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19641102 198903 1 006



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
INSPEKTORAT

Jalan Trikora No. 1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Telp/Fax: (0511) 4780069 Banjarbaru 70713
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id/> E-mail : Inspektorat@banjarbarukota.go.id

Banjarbaru, 06 Maret 2020

Nomor : 700/108/Inspektorat

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Mohon tindak lanjut atas CHR
data dan dokumen pendukung LPPD

Kepada Yth,

Kepala Dinas/Badan, Kepala Bagian

Setdako dan, Camat se-Kota Banjarbaru

di-

Banjarbaru

Sehubungan dengan telah selesainya reuiu atas Laporan Tahunan SKPD Tahun 2019 yang akan digunakan sebagai data dan dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Daerah (LPPD) Kota Banjarbaru dan telah terbitnya catatan hasil reuiu (CHR), maka dengan ini mohon agar seluruh hal yang menjadi catatan reuiu dan saran dalam CHR tersebut dapat menjadi perbaikan SKPD.

Mohon perbaikan tersebut agar disampaikan kepada Inspektorat Kota Banjarbaru paling lambat 12 Maret 2020.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Inspektur

Drs. Rahmat Taufik, M.Si
NIP. 19700615 199003 1 006

Tembusan kepada Yth :

Walikota Banjarbaru (sebagai bahan)

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
INSPEKTORAT



CATATAN HASIL REVIU
DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH ATAS LAPORAN TAHUNAN
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2019

INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU
2020



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU INSPEKTORAT

Jalan Trikora No. 1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Telp/Fax: (0511) 4780069 Banjarbaru 70713
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id/> E-mail : Inspektorat@banjarbarukota.go.id

CATATAN HASIL REVIU DATA DUKUNG ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

URAIAN CATATAN HASIL REVIU DATA DUKUNG ATAS LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

Sehubungan dengan Surat Tugas Inspektur Kota Banjarbaru Nomor : 700/61-SPT/2020/INSPEKTORAT tanggal 4 Pebruari 2020 untuk melaksanakan reviu Data dan Pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

A. PENGUJIAN ATAS BUKTI DUKUNG IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK ADMINISTRASI UMUM

Berdasarkan reviu terhadap Bukti IKK lampiran II.2 Tataran Pelaksanaan Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum antara lain :

1. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggara sudah divalidasi serta sudah dilengkapi dengan bukti dukung yang sah.
2. Kataatan terhadap Peraturan /UU sudah divalidasi serta sudah dilengkapi dengan bukti dukung yang sah
3. Penataan Kelambagaan sudah divalidasi serta sudah dilengkapi dengan bukti dukung yang sah
4. Pengelolaan Kepegawaian sudah divalidasi serta sudah dilengkapi dengan bukti dukung yang sah
5. Perencanaan Pembangunan sudah divalidasi serta sudah dilengkapi dengan bukti dukung yang sah
6. Laporan Keuangan Daerah sudah divalidasi serta sudah dilengkapi dengan bukti dukung yang sah
7. Pengelolaan Barang Milik sudah divalidasi serta sudah dilengkapi dengan bukti dukung yang sah
8. Pemberian Fasilitas terhadap Partisipasi Masyarakat sudah divalidasi serta sudah dilengkapi dengan bukti dukung yang sah

B. PENGUJIAN ATAS BUKTI DUKUNG IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK URUSAN PEMERINTAHAN

NO	IKK	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja	Keterangan
	Rasio konektivitas Kota	<p>Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$</p> <ul style="list-style-type: none"> o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</p> <p>Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5 		Tidak terdapat pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
	Kinerja lalulintas Kota	V/C Ratio di Jalan Kota		Tidak terdapat pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

C. HASIL KLARIFIKASI

1. Dinas Perhubungan sudah melengkapi semua bukti dukung untuk IKK.
2. Perhitungan capaian kinerja telah dilakukan oleh bidang yang melaksanakan program atau kegiatan.

3. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Terhadap IKK tataran pelaksana kebijakan aspek administrasi umum, telah dilengkapi dengan bukti dukung.
- b. Pada tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja urusan pemerintahan bidang Dinas Perhubungan telah diyakini keakuratannya, hal ini semua telah dilengkapi dengan bukti dukung yang sah.

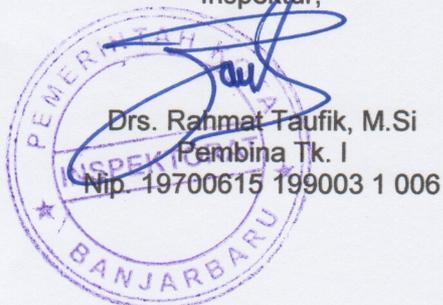
2. Saran

Atas simpulan tersebut diatas, maka Tim Reviu menyarankan agar Tim Penyusun Laporan Tahunan /LPPD Dinas Perhubungan agar :

- a. Dalam penyusunan Laporan Tahunan / LPPD agar memuat data IKK yang telah direview oleh tim Inspektorat Kota Banjarbaru

Mengetahui
Inspektur,

Banjarbaru, 28 Februari 2020



Tim Reviu:

- 1 Maridjo S.Sos
Nip. 19640720 198602 1 003
Pengendali Teknis
- 2 Andi Noor Rakhman S.Sos
Nip.19690620 199010 1 001
Ketua
- 3 Hj Rusda Lainah S,Sos MM
Nip.19640725 199003 2 007
Anggota
- 4 Hj Saidah Ulya S.AP
Nip. 19680419 199303 2 003
Anggota

HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT.

* TIDAK ADA PERUBAHAN X. (FINISH)

TINGGAL MENYERAHKAN KE CAPEM.

DENGAN MENYERTAKAN. (APORAN IKF DAN DATA DUKUNGNYA).